

Menunggu Langkah Jokowi

Wahyudi Kumorotomo

Keputusan presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Januari 2015 yang mengusulkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon tunggal Kapolri menuai banyak kontroversi dan kini melebar ke mana-mana. Pencalonan seorang pejabat tinggi di jajaran Polri yang sebenarnya merupakan hak prerogatif presiden itu telah mengakibatkan konflik terbuka antara KPK dan Polri, kegundahan masyarakat seperti terlihat dalam berbagai bentuk aksi dan demonstrasi untuk pemberantasan korupsi, gejolak politik di DPR dengan munculnya agenda perubahan UU tentang KPK beserta isu pemakzulan presiden, hingga konflik antara lingkungan Istana dan partai PDIP sebagai partai utama pendukung pemerintah.

Berbeda dengan langkah yang diambil ketika menaikkan harga BBM yang tegas dan yakin, langkah yang hendak diambil presiden Jokowi terkait pencalonan Kapolri ini terkesan lamban dan penuh keraguan. Satu-satunya yang bisa menjelaskan hal ini adalah karena presiden tengah terjepit diantara berbagai kepentingan politik yang begitu besar akibat *blunder* yang terjadi sejak pencalonan BG. Janji Jokowi untuk mengambil posisi yang jelas terkait masalah ini setelah kunjungan ke luar negeri bisa jadi akan terus mundur. Bahkan setelah vonis pra-peradilan atas gugatan BG yang dijadwalkan untuk diputus Senin minggu depan, belum tentu segera ada kepastian mengingat besarnya potensi konflik yang masih terjadi.

Mengapa seorang presiden yang didukung rakyat dan sering ceplas-ceplos ketika bicara bisa begitu sulit membuat keputusan untuk menengahi konflik antara KPK dan Polri? Mari kita lihat fakta mengenai perkembangan isu politiknya. Ketika memilih orang-orang kepercayaan yang duduk di dalam kabinet, Jokowi berusaha keras untuk mengakomodasi berbagai kepentingan politik partai pendukungnya, dalam hal ini PDIP, Nasdem, PKB dan sebagian faksi Golkar di bawah pengaruh Wapres Jusuf Kalla. Namun dalam beberapa hal, Jokowi tetap ngotot untuk memilih orang-orang kepercayaannya, yang tentunya mengecewakan sebagian elit Parpol

Munculnya nama BG sebenarnya adalah upaya Jokowi untuk memberi kompensasi kepada elit Parpol. Sebagai mantan ajudan Megawati dan tokoh penghubung bagi Jusuf Kalla yang memungkinkan terbentuknya duet Jokowi-Kalla, pencalonan BG untuk mengganti Komjen Sutarman yang masa jabatannya masih lama adalah langkah strategis. Namun publik sebenarnya sudah melihat bahwa pencalonan BG, perwira tinggi yang prestasinya tidak begitu cemerlang itu menyimpan banyak masalah.

Sebagian masyarakat mungkin masih ingat dengan pemberitaan tentang rekening gendut yang terungkap sejak tahun 2010. Dan ingatan itu kembali menyeruak ketika KPK menetapkan BG sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang menghasilkan tambahan penghasilan tidak kurang dari Rp 22 miliar dalam rekeningnya. Penetapan ini mungkin disertai dengan motif politik Abraham Samad dan komisioner KPK seperti yang dituduhkan oleh Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Presiden selanjutnya mengambil langkah aman dengan mendorong pencalonan ini ke DPR yang seperti kita ketahui didominasi oleh politisi dari

KMP. Tetapi bola panas itu tampaknya segera dioper oleh para politisi di DPR. Kendatipun berdasarkan ketentuan DPR punya waktu 20 hari untuk membuat pertimbangan, dalam waktu enam hari DPR telah secara bulat menyetujui nama BG yang diusulkan oleh presiden.

Publik menyaksikan konflik terbuka antara Polri dan KPK ketika tiba-tiba Kabareskrim Polri menangkap komisioner KPK Bambang Wijoyanto (BW) dengan tuduhan mempengaruhi keterangan saksi dalam kasus Pilkada di Kotawaringin. Setelah BW dilepaskan dari tahanan dan mengajukan pengunduran diri sebagai komisioner KPK, serangan tetap berlanjut kepada seluruh komisioner yang aktif dan bahkan belakangan kepada Jubir Johan Budi SP.

Pada tanggal 16 Januari, presiden menyampaikan pengumuman bahwa pelantikan BG ditunda seraya mengimbau kepada Polri maupun KPK untuk menghindari pergesekan. Konflik panas yang melibatkan dua jajaran penegak hukum di Indonesia itu tetap belum menggerakkan Jokowi untuk mengambil langkah yang tegas terkait pencalonan BG. Dalih yang dikemukakan adalah bahwa presiden tidak akan campur-tangan dalam persoalan hukum.

Tidak sulit untuk melihat bahwa yang dihadapi Jokowi sebenarnya bukan hanya persoalan intervensi hukum, tetapi dilema politik yang berat untuk memberi penjelasan kepada PDIP maupun Parpol pendukung KIH seandainya serta-merta membatalkan pelantikan di tengah mampetnya komunikasi dengan Megawati dan menipisnya dukungan politisi yang selama ini mendukungnya. Bukan rahasia lagi bahwa sebagian dari politisi itu menghembuskan isu kemungkinan pemakzulan apabila garis kebijakan Jokowi berbeda dari kehendak tokoh Parpol. Manuver Jokowi untuk menemui pimpinan Gerindra Prabowo Subianto dan mantan presiden B.J. Habibie tampaknya merupakan sebagian dari upaya penjajakan untuk memperoleh dukungan seandainya presiden melakukan kebijakan drastis.

Strategi mengulur waktu sambil menjaring dukungan opini publik kembali dilakukan ketika presiden membentuk Tim Konsultatif Independen yang terdiri sembilan orang dipimpin Sjfii Maarif. Setelah bekerja selama pekan, media meliput bahwa Tim Konsultatif tersebut mengeluarkan rekomendasi untuk membatalkan pelantikan BG dan mencegah kriminalisasi KPK.

Di luar itu, konflik diantara para politisi dan pejabat di lingkaran Istana tampaknya terus menguat dan menjadi sumber pemberitaan media setiap hari. Di tubuh PDIP sendiri, konon sedang terjadi pertentangan antara yang pro dan kontra dalam hal pencalonan BG dan langkah yang harus diambil presiden dalam konflik KPK dan Polri. Dua politisi yang sebelumnya berada di dalam tim transisi Jokowi-JK dikabarkan mulai berseberangan. Terdapat faksi yang cenderung ke "Teuku Umar" (kediaman Megawati) yang direpresentasikan Plt Sekjen Hasto Kristiyanto melawan faksi "tiga singa" di lingkaran "Merdeka Utara" (Istana Presiden) yang antara lain direpresentasikan Andi Wijayanto.

Perkembangan terakhir menyebutkan bahwa presiden tampaknya akan mengambil opsi kebijakan dengan menunggu keputusan pra-peradilan atas gugatan BG. Sementara itu, berita bahwa Jokowi telah memanggil Menko Polkam dan Kompolnas menimbulkan spekulasi bahwa presiden akan menggantikan posisi BG dengan perwira bintang tiga yang dapat diterima publik dan sekaligus diterima oleh para elit Parpol.

Dengan demikian, langkah yang harus dipertimbangkan oleh Jokowi memang demikian kompleks. Kenyataan bahwa Jokowi adalah presiden yang

bukan berasal dari lingkaran utama elit Parpol merupakan persoalan tersendiri sehingga posisinya bahkan lebih sulit jika dibanding ketika SBY menengahi konflik Cicak versus Buaya. Namun demikian, tentunya Jokowi telah mempertimbangkan masak-masak semua konsekuensi politik maupun hukum.

Jika Jokowi salah mengambil langkah, risiko yang paling berbahaya bagi bangsa ini tentunya adalah mundurnya upaya pemberantasan korupsi sebagai penyakit yang sudah berurat-berakar dalam setiap sendi kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia. Kebajikan politik hanya akan dapat dijamin jika pimpinan nasional mampu menangkap prioritas nasional, suara rakyat, beserta rasa keadilan yang terkadang tidak senantiasa terwakili di dalam teks maupun vonis atas hukum perdata maupun hukum pidana.

Rakyat menghendaki institusi Polri yang bersih dari korupsi. Rakyat juga menghendaki KPK yang efektif dan tidak dikotori oleh kepentingan politik. Konflik pribadi diantara para pimpinan di kedua insitusi ini hendaknya tidak diatasi dengan mengorbankan agenda besar pemberantasan korupsi. Di masa mendatang, perlu diciptakan mekanisme hubungan antar lembaga yang sehat sehingga tidak muncul konflik yang mengorbankan berfungsinya kedua institusi penegak hukum ini. Semoga Jokowi segera mengambil langkah yang tepat agar konflik yang menyita energi dan emosi rakyat ini bisa cepat berakhir.

Penulis adalah gurubesar Jurusan MKP, Fisipol UGM